



**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT TAHUN 2012-2015  
(Studi pada Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas  
Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)  
Dalam Ilmu Ekonomi

Oleh :

**SRI PURNAMA CITRA DEWI**

**NPM 1251010106**

Program Studi Ekonomi Syariah

Pembimbing I : H.A. Khumedi Jafar, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Erike Anggraini, D.B.A.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

1437 H / 2016 M

## ABSTRAK

PBB sebagai salah satu komponen yang mendukung dan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana yang akan diterima oleh daerah penghasilan. Oleh karena itu, PBB perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam penanganannya. Mengingat pentingnya kontribusi yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif. Dalam meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD pemerintah harus mengupayakan supaya masyarakat wajib pajak sadar akan kewajiban dalam membayar pajak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kontribusi PBB terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak, bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang upaya pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak? Tujuan penelitian untuk mengetahui kontribusi PBB terhadap PAD pemerintah Kabupaten Lampung Barat, untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak, untuk mengetahui pandangan ekonomi islam tentang upaya pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematisasi data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif, sehingga didapat kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dilihat dari rata-rata kontribusi pada empat tahun terakhir sebesar 3,5%. Di samping untuk mencapai target PBB di Kabupaten Lampung Barat pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyadarkan masyarakat wajib pajak. Dimana peran pemerintah dalam ekonomi islam terwujud dengan dalam terciptanya lingkungan yang kondusif, pemungutan pendapatan dari sumber-sumber yang tersediadan menaikkan pendapatan negara menetapkan pajak baru bila situasi menuntut demikian, penggunaan keuangan negara untuk tujuan-tujuan yang menjadi kewajiban negara.





## MOTTO

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

*“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. At-Taubah; 41)<sup>1</sup>*



<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 1989, hlm. 285.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusaan masalah .....	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pajak Bumi dan Bangunan .....	18
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	18
2. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Ekonomi Islam .....	19
3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	23
4. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran PBB .....	26
5. Metode Pengambilan Pajak Masa Rasulullah .....	29
B. Pendapatan Asli Daerah .....	35
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	35
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	37
3. Jenis Pendapatan Asli Daerah .....	45

<b>C. Dinas PPKAD .....</b>	<b>47</b>
-----------------------------	-----------

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

<b>A. Dinas PPKAD Lampung Barat .....</b>	<b>49</b>
1. Sejarah Berdirinya Dinas PPKAD.....	49
2. Visi dan Misi Dinas PPKAD .....	51
3. Program dan kegiatan Dinas PPKAD .....	52
4. Struktur Organisasi.....	53
<b>B. Pajak Bumi dan Bangunan .....</b>	<b>55</b>
1. Gambaran umum tentang kontribusi PBB terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat .....	55
2. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat .....	57
3. Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Menyadarkan Masyarakat akan Wajib Pajak.....	58

### **BAB IV ANALISIS DATA**

<b>A. Analisis Kontribusi PBB terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Analisis Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Menyadarkan Masyarakat akan Wajib Pajak.....</b>	<b>68</b>
<b>C. Pandangan Ekonomi Islam terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Menyadarkan Masyarakat akan Wajib Pajak .....</b>	<b>74</b>



**BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>80</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>83</b>

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
1. Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Barat .....	70
2. Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat .....	70
3. Tabel 3. Persentase Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lampung Barat.....	71



**DAFTAR GAMBAR**

Daftar Gambar	Halaman
1. Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat.....	54



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca, maka perlu adanya penjelasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut :

#### 1. Analisis

Proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>2</sup>

#### Kontribusi

Sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama orang lain, atau untuk membuat sesuatu yang sukses.

#### Analisis Kontribusi

Proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama orang lain, atau untuk membuat sesuatu yang sukses.<sup>3</sup>

#### 2. Pajak bumi dan bangunan

---

<sup>2</sup>Nugroho Eko, 2002, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 65

<sup>3</sup>[http://Ghazali Syamni, Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah, Aceh, di ambil pada tanggal 15 November 2016.](http://Ghazali%20Syamni,%20Analisis%20Kontribusi%20Dan%20Efektivitas%20Komponen%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20Terhadap%20Anggaran%20Belanja%20Daerah,%20Aceh,%20di%20ambil%20pada%20tanggal%2015%20November%202016.)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku efektif sejak 11 Januari 2010.<sup>4</sup>PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/ tanah dan /atau bangunan.Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

### 3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “ Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian yang dimaksud judul diatas adalah penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten lampung barat dalam meningkatkan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.

---

<sup>4</sup>Duwi Agustina, *Perpajakan*, LPPM STIE Lampung, hlm. 101.

## B. Alasan Memilih Judul

Dalam penelitian ini yang menjadi alasan mendasar dalam memilih judul ini adalah :

### 1. Alasan Objektif

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan maka daerah otonom harus mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong royongan nasional sebagai peran serta masyarakat membiayai pembangua baik pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

### 2. Alasan Subjektif

Untuk mengetahui mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten lampung barat dalam meningkatkan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.

## C. Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan



Belanja Negara setiap tahunnya. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah membutuhkan dana untuk pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan, dana tersebut diambil oleh pemerintah melalui pajak yang diambil dari masyarakat sehingga pajak ini menjadi salah satu kewajiban masyarakat. Pajak yang dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.<sup>5</sup> Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.<sup>6</sup>

Pengertian pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo yang diikuti dari Prof. Dr. P.J.A. Andriani “ pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.<sup>7</sup> Hal ini juga yang memberikan inspirasi bagi ahli perpajakan yang kerap mengemukakan fungsi budgetair dalam setiap definisi yang diambil. Fungsi budgetair dari pajak secara sederhana dapat dikatakan bahwa pajak adalah sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai

---

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 255

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 2

kepentingan pembangunan negara.<sup>8</sup> Namun sejauh ini masih banyak masyarakat yang kurang sadarkan wajib pajak khususnya di daerah Kabupaten Lampung Barat. Masih ada masyarakat yang enggan untuk membayar pajak sedangkan mereka memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan tersebut. Dalam pemungutan pajak ada pula hambatan-hambatan yang menghambat masyarakat untuk membayar pajak yang seharusnya menjadi salah satu hak dan kewajiban mereka. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>9</sup> Mengenai system perpajakan haruslah diakui bahwa usaha direktorat Jendral Pajak untuk mengembangkan dan menegakkan system yang baik secara konsekuen dan konsisten tidaklah mudah. Kendala yang dihadapi, yang sangat dipengaruhi situasi umum amat banyak.<sup>10</sup> Membayar pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan. Kewajiban ini adalah hak dan kewajiban seluruh bangsa. Membayar pajak berarti mengikatkan diri terhadap pembangunan negara.<sup>11</sup> Membayar pajak berarti pula ada kerelaan berkorban untuk tanah air tercinta. Karena itu perlu diberikan kebanggaan dan pelayanan kepada para pembayar pajak.

---

<sup>8</sup> Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan strategi bisnis*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 16

<sup>9</sup> Duwi Agustina, *Perpajakan I*, LPPM STIE Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm.36

<sup>10</sup> Agustini Asikin, *Pajak, Citra dan Bebannya*, Bina Rena Pariwisata, hlm. 169

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.151

Pajak menjadi salah satu penerimaan yang sangat berpengaruh besar bagi negara. Dari sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian, peran pemerintah dalam perekonomian dapat digolongkan dalam 3 peranan, yaitu peranan alokasi, peranan distribusi, dan peranan stabilisasi. Pemerintah dalam menjalankan peranannya mengeluarkan biaya-biaya yang diperoleh dari berbagai sumber. Pemerintah merupakan suatu pemimpin dalam suatu daerah yang harus ditaati, karena taat kepada pemimpin merupakan cerminan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam pemimpin identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

دُمْن فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالَُوا خَلِيفَةً أَلَا رَضِيَ فِي جَاعِلٍ إِنِّي لِلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ  
لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ مُحَمَّدُكَ نُسَبِّحُ وَنُحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ

تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada paramalaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan*

*Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah : 30)<sup>12</sup>*

Kegiatan Ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah dimana pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik antara lain diperoleh dari pajak. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang khusus dilaksanakan oleh direktorat jendral pajak adalah penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Indonesia.<sup>13</sup> Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan.<sup>14</sup> Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya apabila mereka memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Pajak merupakan hak prerogative pemerintah berupa pungutan yang didasarkan pada undang-undang yang dapat dipaksakan kepada

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 1989, hlm. 13.

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Rev. Ed, ANDI, 2011, hlm. 331

<sup>14</sup> *Ibid.*



subyeknya tanpa batas yang langsung dapat ditunjukkan.<sup>15</sup> Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2011.<sup>16</sup>

Alasan lain yang mendasari perlunya pungutan PBB sebagai satu-satunya pungutan atas Bumi (Tanah) dan Bangunan adalah karena negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar, selain itu ini merupakan modal dasar yang secara terus-menerus perlu ditingkatkan pelayanannya melalui pembangunan nasional, sehingga secara bertahap dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.<sup>17</sup> Mengingat pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.<sup>18</sup>

Pajak menurut pandangan Islam pajak secara umum berarti suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut sistem Ekonomi Islam harus memenuhi empat unsur yaitu harus adanya nash (Al-qur'an dan

---

<sup>15</sup> Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.33

<sup>16</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia, Ed. 10*, Salemba Empat, hlm.201

<sup>17</sup> Agustini Asikin, *Pajak, Citra dan Bebannya*, Bina Rena Parawira, hlm.120

<sup>18</sup> Duwi Agustina, *Perpajakan*, LPPM STIE Lampung, hlm.11

Hadits) yang memerintahkan setiap sumber dan pemungutannya, adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim, sistem pemungutan pajak dan zakat harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama, adanya tuntutan kemaslahatan umum. Di dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

مَّ خَيْرُ دَلِكُمْ اَللّٰهُ سَبِيْلٍ فِىْ وَاَنْفُسِكُمْ بِاَمْوَالِكُمْ وَجَهْدُ وَاَوْثَقَالًا خِفَافًا اَنْفِرُوْا  
تَعْلَمُوْنَ كُنْتُمْ اِنْ لَّكُم

Artinya :Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS.At-Taubah : 41)<sup>19</sup>

Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara (Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening kas negara. Dana bagi hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu komponen yang mendukung dan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana yang akan diterima oleh daerah penghasil. Oleh karena itu, PBB perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah daerah dalam

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 285



penanganannya. Mengingat pentingnya kontribusi yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Dalam Islam pajak bumi disebut dengan istilah kharaj yaitu sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.<sup>20</sup>

Asal mulanya diterapkannya pajak menurut Islam Ibnu Tamiyah mengatakan : “tidak ada pertentangan dalam hadits, karena zakat dan kewajiban lain selain zakat (pajak) disebabkan oleh alasan yang berbeda. Alasan diterapkannya zakat adalah karena memiliki harta di atas batas maksimum (nishab), Sedangkan alasan diterapkannya pajak bukan karena memiliki kelebihan harta, tetapi karena munculnya kebutuhan mendesak dalam masyarakat.” Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Pajak dapat dihapus apabila sudah tidak diperlukan, tetapi menurut teori pajak konvensional tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung. Kabupaten ini dominan dengan perbukitan, dengan luas wilayah lebih kurang 3.368,14 km<sup>2</sup>. Kondisi geografis Lampung Barat yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang luas menjadikan Kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Mulai dari

---

<sup>20</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dhana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hlm.250

pemandangan alamnya yang penuh pesona juga produk hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang melimpah. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten penghasil sayur mayur terbesar di Provinsi Lampung. Berdasarkan gambaran yang telah dijelaskan diatas maka masyarakat Kabupaten Lampung Barat memiliki suatu kepemilikan objek pajak yang banyak dilihat dari produk yang dihasilkan merupakan dari sektor pertanian, perkebunan.

Salah satu sumber keuangan yang dapat diperoleh adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari berapa besar Pendapatan Asli Daerah yang dapat diterima. Sumber-sumber PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil lain PAD yang syah. Dalam meningkatkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pemerintah harus mengupayakan supaya masyarakat wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Menyikapi hal tersebut, diperlukan upaya pemerintah untuk dapat memotivasi masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak yang dalam hal ini tentunya upaya yang harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Upaya yang dipilih akan diterapkan nantinya untuk mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat untuk lebih sadar dalam membayar PBB.

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi salah satu sumber pajak saja yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan dalam penerimaan PAD peneliti membatasi PAD tahun 2012 sampai 2015 untuk melihat Data

target dan realisasi serta perkembangan PAD Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian dengan judul : “ ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012-2015 (Studi pada Dinas PPKAD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat) “.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Apa kontribusi PBB terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak ?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang upaya pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kontribusi PBB terhadap PAD pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak.
- c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam tentang upaya pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak.

## 2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu :

### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan Ilmu Ekonomi khususnya Ekonomi Islam.

### b. Secara praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan study pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung sehingga memperoleh Sarjana Ekonomi Islam dan sebagai pengalaman penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar



belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>21</sup>

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2012-2015.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang peranan Dinas PPKAD serta penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikan. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>22</sup>

Dalam kaitan dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang berkenaan dengan Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meningkatkan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah.

---

<sup>21</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 22

<sup>22</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 47

## 2. Jenis dan Sumber Data

1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>23</sup> Data primer yang dimaksud adalah data-data yang penulis peroleh secara langsung dengan melakukan interview (wawancara) terhadap Dinas PPKAD pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai kontribusi PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meningkatkan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2) Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya<sup>24</sup>. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dengan mengutip literature dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan data-data dari Dinas PPKAD atau instansi pemerintah lainnya.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi.

### a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan studi pendahuluan demi menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

---

<sup>23</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 8

<sup>24</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi dan Bisnis, Rev.Ed.*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2008, hlm. 71



respondennya sedikit.<sup>25</sup> Dalam proses ini yang penulis melakukan wawancara yang tidak berstruktur yaitu melakukan wawancara yang bersifat bebas (berbincang-bincang) dengan staff dan kepala bidang pendataan yang memegang informasi tentang Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat khususnya dalam bidang PBB.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi misalnya catatan harian, biografi, peraturan, kebijakan, foto, dan lain-lainnya.<sup>26</sup> Adapun pelaksanaan metode ini adalah dengan mencatat data yang ada pada dokumen-dokumen, catatan harian, buku pedoman, dan arsip yang ada pada Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat.

#### 4. Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.<sup>27</sup>
- b. Sistematisasi data, yaitu menemukan kebenaran dan menjabarkan pengetahuan yang diperoleh, menggunakan langkah-langkah tertentu yang teratur dan terarah sehingga menjadi suatu keseluruhan yang terpadu.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik dari lapangan maupun pustaka, maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 137

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 240

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, 1993, hlm.126

tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Adapun metode berfikir yang dipakai pada penelitian ini adalah Metode Deduktif.

Metode deduktif adalah cara berfikir yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang umum, fakta-fakta yang unik dan merangkai fakta-fakta yang umum itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat khusus.<sup>28</sup> Dengan metode tersebut akan diuraikan secara umum tentang Upaya Pemerintah di Kabupaten Lampung Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam kemudian akan ditarik kesimpulan secara khusus dari penafsiran awal.

---

<sup>28</sup> Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 32

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pajak Bumi dan Bangunan

##### 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum penulis menguraikan mengenai pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, maka ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian pajak secara umum. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dengan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>29</sup> Beliau juga menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan, artinya bila hutang pajak tidak dibayar maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda bahkan bisa diberlakukan pidana kurungan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.<sup>30</sup>

Menurut Suparman Sumadwijaya, pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna

---

<sup>29</sup>Indra Ismawan, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Elex media komputindo, Jakarta, hlm.04

<sup>30</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.02

untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>31</sup> Selanjutnya mengenai Bumi dan Bangunan pengertiannya dapat dikemukakan dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan Bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Indonesia.<sup>32</sup> Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan.<sup>33</sup> Dengan demikian pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.<sup>34</sup> Dengan kata lain bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran rakyat kepada Negara yang dikenakan kepada mereka yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah dan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab dikenal dengan nama adh-dharibah, yang berasal dari kata dasar dharaba, yadharibu, dharban yang artinya; mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau mebebaskan, dan lain-lain. Dharaba adalah bentuk kata kerja, sedangkan dalam bentuk kata benda adalah dharibah yang dapat

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Hukum pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 03

<sup>32</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Rev. Ed*, ANDI, 2011, hlm. 331

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Waluyo., *Op.cit.* hlm. 116-117



diartikan beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.<sup>35</sup> Adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

عَتَكُونَ أَنِ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تَجَر

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nissa ;29)*<sup>36</sup>

Dalam ayat di atas Allah melarang hambanya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan.

Qardhawi mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>37</sup> Di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah yaitu;

- 1) Diwajibkan oleh Allah SWT.
- 2) Objeknya harta.

<sup>35</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, 2011, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 28

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, 1989, hlm. 122

<sup>37</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*, 2007, Litera Antar Nusa, Jakarta, hlm. 999

- 3) Subjeknya kaum muslim yang kaya.
- 4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan negara.
- 5) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri (pemerintah).<sup>38</sup>

Dilihat dari segi syariah yang berkaitan dengan ekonomi islam maka didapatkan tiga hal yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu;

- a) Ada nash Al-quran dan hadist, jika dilihat dari sisi subyeknya Pajak Bumi dan Bangunan ini jelas bertentangan dengan syariah, karena muslim ikut dibebankan atas tanah dan/atau bangunan yang mereka miliki, tempati dan manfaatkan, padahal mereka adalah pemilik dari bumi dan bangunan yang tertuang dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

كُلِّ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ تَطْعُوهُالْمَ وَأَرْضًا وَأَمْوَالَهُمْ وَدَيْرَهُمْ أَرْضَهُمْ وَأَوْرَثَكُمْ  
 قَدِيرَاشَىء

Artinya : “dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak [1211]. dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.” (QS.Al-Ahzab;27)<sup>39</sup>

- b) Ada pemisahan antara muslim dan non muslim, bahwa atas tanah-tanah taklukan, kaum kafir wajib membayar kharaj. Jika dijual kepada kaum muslim, ia tetap dikenakan karena status kharajiyah tersebut, meskipun nilainya berubah menjadi zakat terhadap tanah kharaj dan

<sup>38</sup>Gusfahmi., *Op. Cit.*, hlm. 32

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 671



tanah kharajiyah (negeri taklukan yang penduduknya telah masuk islam) maka disana berlaku kharaj sampai kiamat. Setiap penduduk muslim dan non muslim yang memanfaatkan tanah kharaj diwajibkan membayar kharaj kepada negara.

- c) Dikenakan hanya terhadap orang kaya. Pajak Bumi dan Bangunan juga tidak memisahkan orang kaya dan miskin, karena kewajiban pajaknya melekat pada objeknya yaitu bumi dan/atau bangunan.<sup>40</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan tidak memiliki dasar syariah, sebagaimana prinsip pendapatan pertama. Hal ini dapat menimbulkan penindasan dan kezaliman pada kaum muslim, terutama yang lemah. Di Indonesia kaum muslim tidak boleh dipungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan termasuk juga terhadap non muslim. Karena tanah yang mereka tinggali bukan termasuk tanah kharajiyah. Kharaj termasuk penerimaan negara resmi atas non muslim atas tanah kharajiyah, namun karena Indonesia bukan termasuk tanah kharajiyah, maka PBB tidak boleh dipungut.<sup>41</sup>

Namun jika kita ikuti pendapat para ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak atas dasar kemaslahatan, maka pajak saat ini memang merupakan sudah kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintahan tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran” yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan

---

<sup>40</sup>Gusfahmi., *Op. Cit.*, hlm.222

<sup>41</sup>Gusfahmi., *Op. Cit.*, hlm.236-237

adalah juga kewajiban. Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum Muslimin yang dipikulkan kepada negara.

### **3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

#### **a. Subjek pajak**

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak.
2. Subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam no. 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur jendral pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no. 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jendral pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no. 4 disetujui, maka Direktur jendral pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no. 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur jendral pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no. 4 Direktur jendral pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui<sup>42</sup>.

Apabila Direktur jendral pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ditetapkan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.<sup>43</sup>

#### **b. Objek pajak**

1. Yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan bangunan.
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Letak.
- b. Peruntukan.

---

<sup>42</sup>Fokusmedia, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2009, Fokusmedia, Bandung, hlm.153-154

<sup>43</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Ed.Rev*, 2008, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.320-321

- c. Pemanfaatan.
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada dalam wilayah Indonesia bisa dimasukkan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan. Namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 sebagai berikut :

1. Objek pajak yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan Diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbale balik.



5. Objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri Keuangan.<sup>44</sup>

Jelas bahwa objek pajak bumi dan bangunan yang secara nyata digunakan untuk kepentingan umum dalam arti bukan untuk mencari keuntungan maka dibebaskan dari pemungutan pajak bumi dan bangunan.

#### **4. Prosedur pelaksanaan pendaftaran PBB**

Pada prinsipnya setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melakukan pendaftaran pada kantor pengelola pajak daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (bagi wajib pajak orang pribadi) atau tempat kedudukan (bagi wajib pajak badan) untuk dicatat sebagai wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Objek Pajak Daerah (NODP).

Dalam rangka pendaftaran objek pajak, subjek pajak mendaftarkan objek pajak yang dimilikinya dengan mengisi formulir surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal pajak. Surat pemberitahuan objek pajak tersebut harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani oleh wajib pajak, SPOP yang sudah diisi harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek pajak berada selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh

---

<sup>44</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, 2013, ANDI, Yogyakarta, hlm. 334



wajib pajak. Demikian menurut pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, yang harus didaftarkan oleh subjek pajak adalah:

- a. Data diri perorangan atau badan yang menjadi subjek pajak
- b. Semua tanah yang dimiliki dengan suatu hak dan atau dimanfaatkan
- c. Semua bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai dan dimanfaatkan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap, dan tepat waktu adalah merupakan suatu ketentuan, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan salah tafsir sehingga dapat merugikan Negara atau wajib pajak itu sendiri, jadi data yang diminta dalam SPOP harus di buat sedemikian rupa baik data diri perorangan atau badan maupun data objek pajak seperti luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga perolehan dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan SPOP ini Direktorat Jenderal Pajak setempat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Pajak terhutang berdasarkan SPPT ini harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Dalam hal SPOP tidak disampaikan oleh wajib pajak dalam waktu 30 hari setelah diterimanya SPOP tersebut dan telah ditegur secara tertulis tetapi ternyata tidak juga dikembalikan oleh wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan pemeriksaan dan keterangan lainnya. Jumlah pajak yang terhutang dalam

SKP yaitu sebesar pokok pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Pajak terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Jika pada saat jatuh tempo (6 bulan sejak diterimanya SKP oleh wajib pajak) ternyata pajak tidak dibayar atau kurang bayar, maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, denda dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Sarana pendaftaran subyek dan obyek pajak bumi dan bangunan digunakan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP) menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 harus diisi dengan ketentuan :

1. Jelas, maksudnya adalah bahwa penulisan data yang diminta dalam SPOP harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara atau wajib pajak itu sendiri.
2. Benar, artinya data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom atau pertanyaan yang ada pada SPOP.
3. Lengkap, artinya bahwa semua kolom pada SPOP baik yang menyangkut wajib pajak maupun data tanah dan atau bangunan, harus diisi sesuai keadaan yang sebenarnya. Kemudian SPOP tersebut harus diberi tanggal pengisian SPOP dan ditandatangani oleh wajib pajak.

4. Tepat waktu, artinya SPOP yang sudah diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak.

Berdasarkan data hasil pendaftaran yang dilakukan oleh wajib pajak maka kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan mengeluarkan atau menetapkan SPPT kepada wajib pajak. SPPT merupakan surat yang dipergunakan oleh Dirjen Pajak (dalam hal ini kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) untuk memberitahukan kepada wajib pajak besarnya pajak terhutang.

## **5. Metode Pengambilan Pajak Masa Rasulullah**

### **a. Kharaj**

#### **1) Pengertian kharaj**

*Kharaj* atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman<sup>45</sup>.

*Kharaj* menurut bahasa (harafiah) berarti kontrak, sewa-menyewa, atau menyerahkan. Sebagai salah satu baitul maal kharaj ditetapkan

---

<sup>45</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 123

pertama kali pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab r.a. atas tanah yang berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin.

Setelah istilah terdapat beberapa pendapat tentang definisi kharaj diantaranya :

Menurut Abdul Mujieb, kharaj adalah semacam pajak bumi, kharaj ini harus diberikan oleh *ahludz dzimmah* kepada pemerintah Islam sebagai jaminan keamanan.<sup>46</sup> *Ahludz dzimmah* disini maksudnya adalah orang-orang kafir penduduk suatu negeri yang dikuasai oleh Islam, akan tetapi mereka masih diperbolehkan melakukan ibadah dengan leluasa menurut agamanya masing-masing di bawah penguasaan Islam. Mereka mendapat jaminan keamanan, akan tetapi sebagai gantinya mereka membayar upeti. Perseorangan mereka disebut *dzimmiy*.<sup>47</sup> Jadi yang dimaksud dengan kharaj menurutnya adalah pajak yang dikenakan kepada masyarakat non Islam atas kemanfaatan tanah atau bumi yang ada dalam kekuasaannya atau dimilikinya.

*Kharaj* adalah hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun melalui jalan damai. Oleh Karena itu kharaj ada dua macam yaitu :

a) *Kharaj unwah*

*Kharaj unwah* adalah kharaj yang diambil dari semua tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir secara paksa

<sup>46</sup> Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 159

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 9



melalui perang, misalnya tanah Irak, Syam dan Mesir. Dasarnya adalah terdapat pada QS. Al Hasyr ayat 7 :

بَيْنَ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلٌ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءٌ مَا  
مَأْخُذُهُ الرُّسُولُ أَتَنْكُمُ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءٌ بَيْنَ دَوْلَةٍ يُكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِ  
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَنْتَهُوا عَنْهُ نَهَكُمْ وَ

Artinya : “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al Hasyr; 7)<sup>48</sup>

b) *Kharaj shulhi*

*Kharaj shulhi* adalah kharaj yang diambil dari setiap tanah yang penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin secara damai. Kharaj ini ada seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati di antara kaum muslimin dan pemilik tanah tersebut. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut menjadi hak kaum muslimin dan penduduknya tetap tinggal di atasnya dengan kesediaan membayar kharaj, maka kharaj berlaku secara permanen atas tanah tersebut.

Sedangkan untuk menetapkan besarnya kharaj, khalifah dapat bermusyawarah dengan para ahli yang dapat memperhitungkan luas tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya.

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 916



Sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar ketika akan menetapkan kharaj atas tanah sawad. Maka ketika akan menetapkan kharaj, haruslah diperhatikan kondisi tanah tersebut. Pada prinsipnya tidaklah ditetapkan kharaj atas pemilik di luar batas kemampuannya.<sup>49</sup> Kharaj berbeda dengan *usyur*. *Usyur* adalah apa yang diambil atas hasil pertanian tanah *'usyriyyah*. Yang termasuk tanah *'usyriyyah* adalah:

- Jazirah Arab
- Tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai, seperti Indonesia.
- Tanah *'unwah* yang dibagikan kepada pasukan perang kaum muslimin, seperti tanah Khaibar.
- Tanah yang penduduknya melakukan perdamaian dengan kaum muslimin dengan kesepakatan tanah tersebut milik mereka. Maka apabila mereka masuk Islam atau dijual kepada seorang muslim, tanah tersebut menjadi tanah *'usyriyyah*.
- Tanah mati yang dihidupkan seorang muslim.

Kharaj adalah hak kaum muslimin, dan dipergunakan untuk kemaslahatan negara, seperti membayar gaji pegawai, tentara, pengadaan senjata. Juga diberikan kepada para janda, orang yang membutuhkan, serta untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dalam hal ini khalifah menyalurkannya sesuai dengan pendapat ijtihadnya.<sup>50</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa kharaj merupakan pajak

---

<sup>49</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007 hlm.119

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 119

atas bumi dan manfaatnya (hasilnya) yang dikenakan pada non Muslim ataupun orang Muslim yang berada di wilayah kekuasaan (Negara) Muslim.

## 2) Dasar hukum kharaj

Adapun dasar hukum kharaj terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-mukminun ayat 72 yang berbunyi sebagai berikut :

الرَّزِقِينَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ رَبِّكَ فَخَرَّاجُ خَرَجَاتِ سَلَامٍ

Artinya :*Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik.* (QS. Al-Mu'minuun; 72)<sup>51</sup>

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat dimengerti bahwasanya kharaj itu merupakan upah atas sewa tanah yang dikenakan kepada orang-orang non muslim yang hidup di Negara islam dan ditaklukkan oleh orang islam. Pengenaan kharaj atas mereka merupakan kompensasi dari perjanjian perdamaian demi mendapatkan jaminan keselamatan untuk tetap tinggal di Negara islam dan tetap dapat memanfaatkan tanah tersebut sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Apabila mereka kemudian memeluk agama islam setelah penaklukan tersebut maka status tanah tersebut tetap kharajiyah.

Adapun yang dimaksud dengan kalimat “upah dari Tuhanmu” dalam ayat di atas adalah rezeki yang di anugerahkan Tuhan di dunia dan pahala di akhirat.

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 534

## **b. Persamaan dan Perbedaan Kharaj dan PBB**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pada kharaj dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat kesamaan dan perbedaan yang mendasar. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut <sup>52</sup>:

### **1) Persamaan kharaj dan PBB**

Secara umum, baik kharaj maupun PBB merupakan kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat atas pemanfaatan tanah yang dimilikinya.

Dengan demikian persamaan dari keduanya dapat dilihat dari objek dari kharaj dan PBB.

- a) Kharaj dan PBB merupakan kewajiban yang sama-sama harus dibayarkan kepada pemerintah
- b) Kharaj dan PBB dibebankan atas tanah/bumi yang dimiliki dan diambil manfaatnya oleh masyarakat
- c) Dilihat dari kemanfaatannya, objek kharaj dan PBB dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan atas fasilitas umum yang dipergunakan untuk kemaslahatan warga.

### **2) Perbedaan kharaj dan PBB**

Perbedaan kharaj dan PBB dapat dilihat dari dua aspek baik objek pajak maupun subjek pajak. Diatas telah dijelaskan persamaannya dari segi objek pajak. Namun jika dipahami secara menyeluruh, objek PBB

---

<sup>52</sup>Adhar, 2011, *Skripsi Aplikasi Kharaj dan PBB sebagai Sumber Pendapatan Negara*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

terlihat lebih luas dan kompleks dibanding dengan kharaj. Dimana kharaj dikenakan atas manfaat lahan pertanian atau lahan lainnya yang dimiliki masyarakat non muslim. Sementara objek PBB mencakup segala lahan baik bumi dan isinya serta bangunan dalam artian yang luas.

Timbulnya perbedaan diatas dapat dipahami sebagai bentuk perkembangan dunia dalam sektor perekonomian dan pembangunan. Dimana pada awal islam, objek Pajak Bumi dan Bangunan masih terbatas dan belum seluas pada masa sekarang.

Perbedaan lain dari keduanya adalah dapat dilihat dari subjek pajak. Dimana kharaj diberikan kepada ahludz dzimmah (non Muslim) oleh pemerintah islam dan tidak dibebankan kepada umat islam, sedangkan PBB dibebankan kepada warga negara baik itu Muslim maupun non Muslim.

## **B. Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam sistem atau bentuk perekonomian khususnya perekonomian daerah, peran pemerintah daerah mutlak diperlukan tidak hanya sebagai penyedia akan jasa dan barang publik melainkan juga memelihara kestabilan ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki distribusi pendapatan di wilayah-wilayah daerahnya. Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai undang-undang. Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.<sup>53</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 adalah terdiri dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.<sup>54</sup> Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan kelulusan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai prwujudan desentralisasi.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan

---

<sup>53</sup> Ahmad Yani, *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, hlm.52

<sup>54</sup> Yuliati, 2000, *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kelima*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.



terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

## 2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Sebagaimana dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Menurut Yuliati sumber Pendapatan Asli Daerah sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri :<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Yuliati, 2000, *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kelima*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah di samping retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.<sup>56</sup> Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut<sup>57</sup> :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya;
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik;

Sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

---

<sup>56</sup>Situmorang, Victor M., 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 202

<sup>57</sup> [http:// www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com), diambil tanggal 27 juli 2016

pemerintah daerah dan pembangunan.<sup>58</sup> Pada pasal 2 ayat (2), jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Berdasarkan jenis pajak, kabupaten atau kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah kabupaten atau kota tersebut dipandang kurang memadai. Menurut Tjahya Supriatna, penetapan pajak daerah sedapat mungkin memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut<sup>59</sup>:

1. Hasil pemungutan pajak harus mencakup belanja pemerintah daerah dengan ongkos pungutan serendah mungkin. Hasil tersebut dapat diperkirakan dan bersifat elastis, sedapat mungkin bertambah secara otomatis dengan pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan dan sebagainya.
2. Keadilan, baik keadilan horisontal, vertikal, maupun geografis yang ditinjau dari segi kemampuan untuk membayar dan dari

---

<sup>58</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah, 2009, Fokus media, Jakarta.

<sup>59</sup>Supriatna, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 177

segi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat wajib pajak atau retribusi. Dasar pengenaan pajak atau retribusi dan subyek yang membayar harus jelas.

3. Efisiensi, pajak dan retribusi daerah harus mendorong efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi, dalam bentuk sedikit mungkin menimbulkan distorsi atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan para konsumen dan produsen. Misalnya yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan ekspor non migas, maka tidak dikehendaki pengenaan pajak atau pungutan atau lalu lintas komoditi ekspor antar daerah karena pengenaan itu akan mempengaruhi efisiensi produksi dan distribusi barang ekspor.
4. Kemampuan administratif, adalah kemampuan untuk melaksanakan berdasarkan kemampuan administratif yang ada. Kemampuan tersebut dapat diidentifikasi dari jumlah pegawai yang ada, keahlian, kejujuran dan perangkat administrasi yang memadai.
5. Politis, pelaksanaan pajak harus diterima secara politis. Pengenaan pajak yang tumpang tindih sedapat mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan keluhan bagi masyarakat. Contoh pungutan pendaftaran perusahaan yang penagihannya tumpang tindih dengan PBB.
6. Dampak positif, bahwa pajak daerah harus memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi daerah sehingga



perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan suatu jenis pajak daerah.

b. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Ciri-ciri pokok retribusi daerah yakni <sup>60</sup>:

1. Retribusi dipungut oleh daerah
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>61</sup> Retribusi daerah dibagi tiga golongan :

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi., *Op. Cit.*



kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
3. Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, parasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Perusahaan daerah

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatannya yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.<sup>62</sup>

Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situ lah keuntungan itulah sebagian disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam

---

<sup>62</sup>Supriatna., *Op.Cit.*, hlm. 195

bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu :<sup>63</sup>

1. Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasionalisasi perusahaan asing.
2. Perusahaan yang berasal dari perusahaan negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
3. Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

Salah satu maksud didirikannya perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerja. Keuntungan yang didapat inilah yang disebut dengan laba bagian badan usaha milik daerah.

Laba Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain

---

<sup>63</sup>Supriatna., *Op.Cit.*, hlm. 197

yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah, walaupun sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan daerah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lainnya.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintah daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat Pemerintah Daerah (Dinas) yang dalam kegiatannya

menghasilkan suatu barang atau jasa dan dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.<sup>64</sup>

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini masih lebih baik dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah dan relatif merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.<sup>65</sup>

### 3. Jenis Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu :

#### 1) Pajak daerah

Merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak

#### 2) Retribusi daerah

---

<sup>64</sup>Supriatna, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 198

<sup>65</sup>Yuliana., *Op.Cit.*, hlm. 20

Merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah dirinci menjadi :

a. Pajak provinsi yaitu pajak yang terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak Kabupaten/kota yaitu pajak yang terdiri dari :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir

c. Retribusi ini dirinci menjadi :

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perijinan tertentu



3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Pendapatan lain-lain yang sah

Dilain pihak adalah penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan dinas, pajak retribusi dan bagian laba perusahaan daerah. Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang(bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah.

### **C. Dinas PPKAD**

#### **1. Pengertian Dinas PPKAD**

Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Dinas PPKAD merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Barat dengan Bagian Keuangan dan Bagian Umum dan Barang sejak tahun 2008 hingga sekarang. Sejak digabungkannya dan menjadi Dinas PPKAD fungsi koordinator dan pengelola pendapatan daerah menjadi tumpang tindih antara petugas pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembukuan, dan pelaporan dan petugas penagihan dan monitoring. Seluruhnya ditangani oleh seksi Pendapatan Asli daerah.

#### **2. Tugas Fungsi Dinas PPKAD**

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

**a. Tugas**

Tugas Dinas PPKAD adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

**b. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas PPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- 5) Pelayanan administratif.

### **BAB III**

#### **HASIL LAPORAN PENELITIAN**

##### **A. Dinas PPKAD Lampung Barat**

###### **1. Sejarah Berdirinya Dinas PPKAD**

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yaitu merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung Barta dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 24 september 1991. Setelah diresmikannya Kabupaten Lampung Barat maka disyahkan pula peraturan daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah beberapa kali di ubah dan terahir dengan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014, dimana salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)<sup>66</sup>. Dinas PPKAD merupakan gabungan antara dinas pendapatan daerah kabupaten Lampung Barat dengan bagian keuangan dan bagian umum dan barang. Pada tahun 2008 diresmikan menjadi hingga Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) hingga sekarang.

Selanjutnya berdasarkan peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang tugas, fungsi, rincian tugas dan tata kerja dinas-dinas sekabupaten Lampung Barat dimana pada Bab XVI bagian kesatu

---

<sup>66</sup>Dokumen, *Dinas PPKAD*, Kabupaten Lampung Barat, 2008.

pasal 252 tentang susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari<sup>67</sup> :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan ; dan
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan, membawahi :
  - 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah; dan
  - 2) Seksi Dana Perimbangan
- d. Bidang Anggaran, membawahi :
  - 1) Seksi Penyusunan Anggaran; dan
  - 2) Seksi Pembinaan Anggaran
- e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
  - 1) Seksi Belanja Pegawai; dan
  - 2) Seksi Belanja Non Pegawai
- f. Bidang Pembukuan, membawahi :
  - 1) Seksi Akuntansi; dan
  - 2) Seksi Pelaporan.
- g. Bidang Kekayaan Daerah, membawahi :
  - 1) Seksi Inventarisasi Aset; dan
  - 2) Seksi Pengendalian Aset.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

- h. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, membawahi :
  - 1) Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan; dan
  - 2) Seksi Pelayanan dan Penagihan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

## 2. Visi dan Misi Dinas PPKAD

Searah dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka visi dan Misi Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat untuk periode 2012-2017 dapat diuraikan sebagai berikut<sup>68</sup> :

### a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke arah mana Dinas PPKAD harus di bawa, agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga merupakan suatu keadaan yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh Dinas PPKAD.

Dengan memperhatikan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, tugas dan fungsi SKPD, pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, serta keinginan Stake Holders, maka Visi Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat adalah “ **Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional**”.

---

<sup>68</sup>*Ibid.*



b. Misi

Misi merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka mencapai suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan tujuan sasaran, dan strategi. Dengan kata lain, Misi merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan SKPD ingin dicapai.

Adapun misi Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat adalah :

- 1) Meningkatkan Penerimaan Keuangan Daerah
- 2) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan

### 3. Program dan Kegiatan Dinas PPKAD

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/ 23/ KPTS/ 11.15/ 2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang penetapan revisi rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2012-2017<sup>69</sup>. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat memiliki program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2012-2017. Program pembangunan tersebut diaplikasikan melalui berbagai kegiatan yang merupakan lokalitas kewenangan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat.

---

<sup>69</sup>Dokumen, *Dinas PPKAD*, Kabupaten Lampung Barat, 2012.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2012-2017 sebagai berikut<sup>70</sup> :

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 4) Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 5) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 6) Meningkatkan akurasi data dan aktualitas data
- 7) Penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah serta PBB
- 8) Melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta PBB

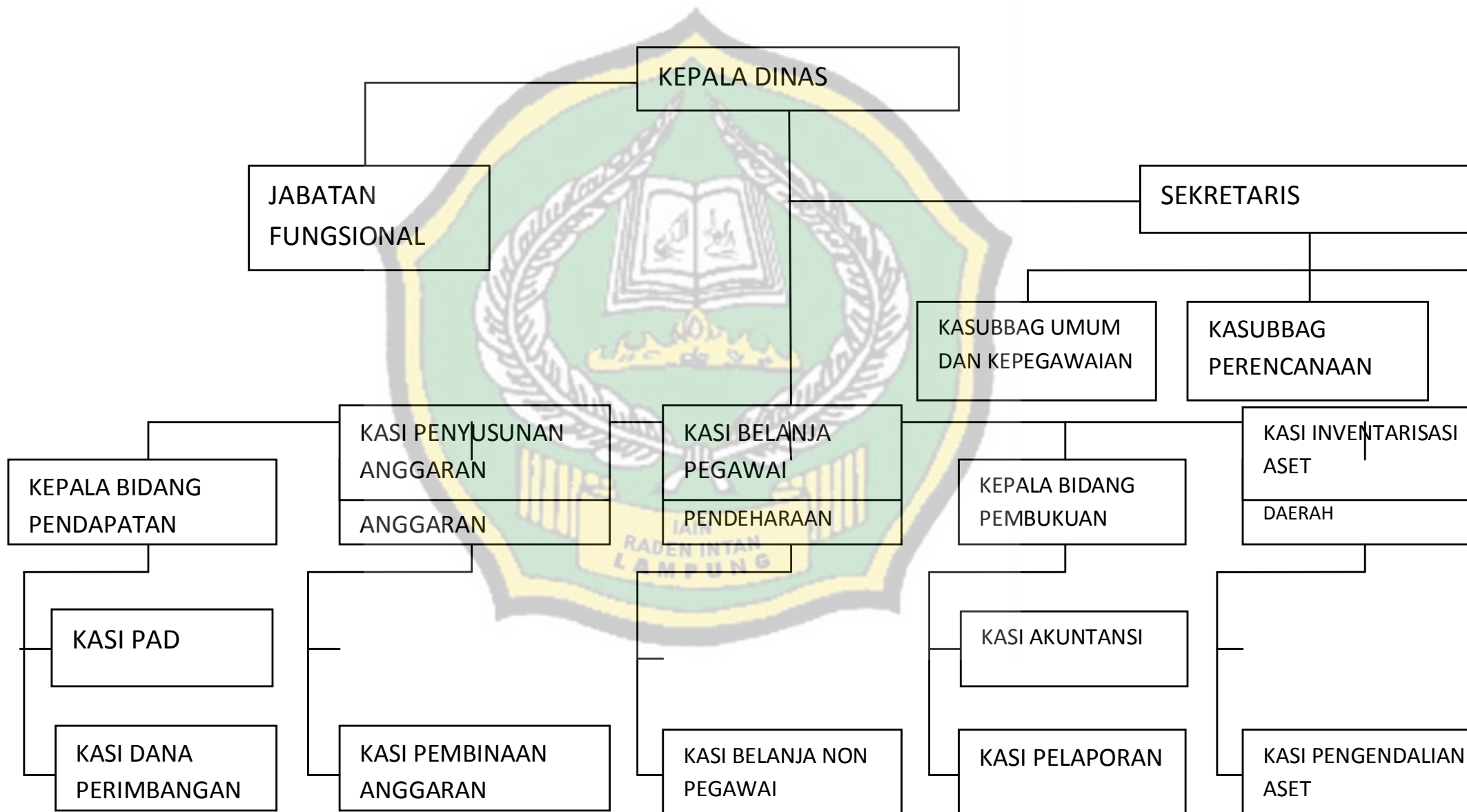
#### **4. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, struktur organisasi Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat adalah <sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>*Ibid.*



## **B. Pajak Bumi dan Bangunan**

### **1. Gambaran umum tentang kontribusi PBB terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat**

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah diperlukan penyediaan fasilitas sumber-sumber pembiayaan, yang salah satunya melalui penghasilan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya meningkatkan penyediaan fasilitas dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan peningkatan jumlah objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lampung Barat, melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

Subjek pajak Bumi dan Bangunan yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat meliputi :

- 1) Orang atau badan yang memiliki bumi (tanah), atau
- 2) Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi (tanah) atau
- 3) Orang atau badan yang memiliki bangunan, atau
- 4) Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian subjek pajak dapat dipahami semua orang atau badan usaha yang memiliki hak atas bumi dan/atau bangunan dan memperoleh manfaat atas kepemilikannya tersebut. Apabila seseorang atau badan usaha telah memiliki dan memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan maka ia wajib untuk menunaikan pajaknya dan wajib bagi negara untuk menarik pajak kepada mereka. Apabila mereka tidak

menunaikan pajaknya, maka pemerintah dapat secara paksa untuk menariknya.

Sedangkan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan / atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan, termasuk dalam pengertian bangunan.

Dengan demikian objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Barat dapat berupa :

1. Bumi (tanah) contoh : sawah, ladang, tanah rawa dan lain-lain
2. Bangunan contoh : pertokoan
3. Bumi dan bangunan contoh : rumah tinggal, gedung kantor, toko, dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan landasan hukum dan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan jumlah objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lampung Barat. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong royongan dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan



wajib pajak memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak. Prinsip dan sistem ini dimaksudkan untuk tercapainya target penerimaan Pajak Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Di samping itu untuk pencapaian target penerimaan PAD sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah berupaya semaksimal mungkin agar pencapaian target penerimaan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan.

## **2. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat**

Kabupaten Lampung Barat memiliki target pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap tahunnya mengalami kenaikan target pendapatan, namun pencapaian target penerimaan selalu dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target dan realisasi penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini <sup>72</sup>:

---

<sup>72</sup>Dokumen, *Dinas PPKAD*, Kabupaten Lampung Barat.

**Tabel 1.**

Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Barat

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2012	1.646.708.994,-	1.646.708.994,-	100%
2.	2013	1.169.075.231,-	1.169.075.231,-	100%
3.	2014	1.261.904.078,-	1.898.744.966,-	150%
4.	2015	2.365.000.000,-	2.832.748.365,-	120%
Rata-rata		6.442.688.303,-	7.547.277.556,-	117%

Sumber : Data Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat tahun 2016

Tabel di atas merupakan data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Barat yang sudah dicapai dalam kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat. Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat yang harus dicapai dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 2.**

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2012	26.046.299.147,-	28.192.204.519,-	108,2%
2.	2013	26.309.774.581,-	29.113.182.076,-	110,6%
3.	2014	37.390.274.109,-	40.800.316.214,-	109,1%
4.	2015	41.023.966.192,-	43.730.143.098,-	106,5%

Sumber : Data Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat tahun 2016

Tabel di atas merupakan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat yang setiap tahunnya telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah salah satunya yaitu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat kita lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.**

Persentase Kontribusi PBB pada PAD Kabupaten Lampung Barat

No.	Tahun	PBB (Rp)	PAD (Rp)	Persentase
1.	2012	1.646.708.994,-	28.192.204.519,-	3,5%
2.	2013	1.169.075.231,-	29.113.182.076,-	3,4%
3.	2014	1.898.744.966,-	40.800.316.214,-	2,5%
4.	2015	2.832.748.365,-	43.730.143.098,-	4,6%

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat tahun 2016

Tabel di atas merupakan data yang memperlihatkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat setiap tahunnya.

### **3. Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak**

Selain untuk pencapaian target penerimaan PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah berupaya semaksimal mungkin agar pencapaian target penerimaan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang

diharapkan. Dalam rangka pencapaian target penerimaan PAD di bidang Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengadakan upaya dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak, yaitu<sup>73</sup> :

- a. Mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat ;
- b. Melakukan pendataan ulang agar subjek pajak sesuai dengan keadaan di lapangan;
- c. Memberikan penghargaan kepada pekon atau desa yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu ;
- d. Memberikan insentif kepada petugas pemungut pajak.

Sehubungan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak seperti yang telah di sebutkan di atas, menurut hasil penelitian penulis di lapangan bahwa pencapaian target penerimaan PAD khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tercapainya target penerimaan PAD dari bidang PBB di atas disebabkan oleh adanya beberapa factor peluang yang dapat mendukung pelaksanaan tugas. Peluang tersebut antara lain<sup>74</sup>:

---

<sup>73</sup>Wawancara, Anton, KASI Bidang PBB, Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat Selasa, 07 Juni 2016

<sup>74</sup>*Ibid.*

### 1. Era otonomi daerah

Otonomi daerah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia, dimana daerah otonom (Kabupaten/Kota) dituntut untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Peran Dinas PPKAD dalam hal ini adalah sebagai pembantu Kepala Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

### 2. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi telah merambah sampai Kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dirasa sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas PPKAD.

### 3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerhkannya PBB yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah akan berdampak pada meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah.



#### 4. Sumber daya

Dinas PPKAD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika sumber daya tersebut dapat dioptimalkan maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPKAD, meskipun harus diakui bahwa kondisi saat ini dirasa masih kurang untuk kedua sumber daya tersebut, baik dari segi kuantitas dan kualitas.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Kontribusi PBB terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat**

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Lampung Utara. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah diperlukan penyediaan fasilitas sumber-sumber pembiayaan, yang salah satunya adalah melalui penghasilan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya meningkatkan penyediaan fasilitas dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan peningkatan jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Barat. Pajak Bumi dan Bangunan sangat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang pendapatan terbesar merupakan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dipahami bahwa objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi atau tanah dan/atau bangunan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994, yaitu :

“ yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan”.

Pengertian bumi dan/atau bangunan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) adalah:

- 1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya
- 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bab II tentang objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat diketahui bahwa objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bumi dan/atau bangunan yang apabila dipahami secara menyeluruh meliputi permukaan bumi yang segala yang ada di bawahnya seperti, sawah, ladang, tambang dan lain-lain, dan segala yang melekat di atas tanah atau perairan seperti konstruksi bangunan, hotel, perusahaan, rumah, dan lain-lain.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- a) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
- b) Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
- c) Memiliki bangunan, dan/atau;
- d) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian subjek pajak dapat dipahami semua orang atau badan usaha yang memiliki hak atas bumi dan/atau bangunan dan

memperoleh manfaat atas kepemilikannya tersebut. Apabila orang atau badan usaha telah memiliki dan memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan maka ia wajib untuk menunaikan pajaknya dan wajib bagi negara untuk menarik pajak kepada mereka. Apabila mereka tidak menunaikan pajaknya, maka pemerintah dapat secara paksa menariknya.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bentuk dan bukti perwujudan kegotong royongan masyarakat wajib pajak dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Kabupaten Lampung Barat. Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak terbesar di Kabupaten Lampung Barat menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan sesuatu yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat baik berupa hasil pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain yang syah.

Berdasarkan ketentuan dan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa PAD adalah sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya yang diimplementasikan dalam bentuk pemungutan pajak, retribusi, BUMD dan pendapatan lain yang syah.

Setelah data terkumpul maka akan diuraikan untuk mengetahui perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai.

**Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Barat**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2012	1.646.708.994,-	1.646.708.994,-	100%
2.	2013	1.169.075.231,-	1.169.075.231,-	100%
3.	2014	1.261.904.078,-	1.898.744.966,-	150%
4.	2015	2.365.000.000,-	2.832.748.365,-	120%
Rata-rata		6.442.688.303,-	7.547.277.556,-	117%

Sumber : Data Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat tahun 2016

Berdasarkan keadaan persentase target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam 4 (empat) tahun terakhir ini seperti pada tabel di atas diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli daerah dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan mengalami pencapaian realisasi tertinggi adalah pada tahun 2014 yaitu mencapai 150%. Sedangkan untuk realisasi paling kecil sebesar 100% pada tahun 2013 hal tersebut dikarenakan tingkat pendapatan pada tahun 2013 lebih sedikit bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2012.

Untuk uraian masing-masing target dan realisasi dapat dianalisis seperti di bawah ini. Pada tahun 2012 diperoleh persentase sebesar 100% dilihat dari jumlah realisasi sama dengan jumlah target yang ditetapkan. Tahun 2013 diperoleh sebesar 100%, tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi 150%, dan pada tahun 2015 mengalami



penurunan sehingga persentase realisasi yang dicapai sebesar 120%. Hasil target dan realisasi secara keseluruhan sudah mencapai target karena diperoleh rata-rata target dan realisasi dari tahun 2012-2015 sebesar 117%.

#### **Persentase Kontribusi PBB pada PAD Kabupaten Lampung Barat**

No.	Tahun	PBB (Rp)	PAD (Rp)	Persentase
1.	2012	1.646.708.994,-	28.192.204.519,-	3,5%
2.	2013	1.169.075.231,-	29.113.182.076,-	3,4%
3.	2014	1.898.744.966,-	40.800.316.214,-	2,5%
4.	2015	2.832.748.365,-	43.730.143.098,-	4,6%
Rata-rata		1.886.819.389,-	35.458.961.476,-	3,5%

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2012 kontribusi PBB terhadap PAD terhadap Kabupaten Lampung Barat sebesar 3,5%, pada tahun 2013 kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Lampung Barat sebesar 3,4%, pada tahun 2014 kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan sehingga persentase yang diperoleh sebesar 2,5%, dan pada tahun 2015 kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Lampung Barat kembali mengalami kenaikan sehingga yang diperoleh sebesar 4,6% dari target pencapaian kontribusi sebesar 25%. Menurut pendapat peneliti penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang baik yang setiap tahunnya masih fluktuatif. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya mencapai target dan bahkan pencapaian dapat melebihi target yang telah di

tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tetapi kontribusi yang diberikan terhadap PAD Kabupaten Lampung Barat tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan kesan yang kurang baik bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemerintah masih kurang di patuhi oleh masyarakat wajib pajak. Roda pemerintah dan pembangunan di daerah tidak akan pernah bergerak jika tidak adanya dana atau anggaran pendapatan belanja yang cukup memadai.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak nasional yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil sejalan dengan sistem perpajakan nasional. Berdasarkan penjelasan tersebut penerimaan pajak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat pajak bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat membiayai dan melaksanakan tugas pembangunan maka yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dari penerimaan daerah yang di dalamnya terdapat PAD yang sumbernya diperoleh dari pajak khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan kontribusi terhadap anggaran yang ditetapkan untuk kesejahteraan sosial. Tinggi rendahnya kontribusi PAD dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan bergantung dari optimalisasi penerimaan PAD bidang pajak, atau karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan proporsi anggaran dalam pembangunan daerah. Seperti kita ketahui bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## **B. Analisis Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak**

Berbicara mengenai sadar dan kesadaran yang kaitannya dengan masyarakat adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa tahu, ingat kepada keadaan yang sebelumnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa. Selanjutnya sadar didefinisikan sebagai sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti, taat dan patuh kepada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada, juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan mengerti, taat patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan orang yang ada pada waktu tertentu, berada bersama-sama dengan tujuan yang sama dan di tempat yang sama.

Berdasarkan definisi di atas maka kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang didukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adanya kesadaran masyarakat itu untuk mendorong keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Tingkat kesadaran masyarakat akan mempengaruhi bagaimana kegairahan mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan

kata lain bahwa kesadaran masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena akan mendorong kerelaan mereka dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Disamping kemampuan masyarakat ada dalam membayar pajak namun tidak didukung dengan kesadaran yang tinggi maka masyarakat akan tetap enggan untuk membayar pajak. Berkaitan dengan masalah pembayaran PBB, maka dalam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat perlu lebih dikaitkan dengan gambaran kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu berhubungan dengan faktor golongan sosial, politik atau ekonomi, serta tingkat pendidikan, sifat dan bentuk pekerjaan yang dilakukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak salah satunya dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dan pemerintah. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Dilihat dari segi upaya pemerintah yang disebutkan pada bab sebelumnya selaku pimpinan suatu daerah sudah dapat membantu dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak. Kesadaran masyarakat membayar pajak tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya.



Namun disamping faktor peluang yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan upaya-upayanya ada faktor lain yang dapat menghambat pemerintah dalam menjalankan upaya-upayanya seperti:

- a. adanya daerah yang masih sulit untuk di datangi,
- b. kurangnya kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi wajib pajak baru,
- c. adanya prasangka negatif dari masyarakat kepada petugas pajak,

Dalam hal ini maka masyarakat masih enggan untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Selain adanya faktor hambatan dari pemerintah adapun faktor hambatan dari masyarakat yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan seperti:

1. Faktor yang cukup menonjol adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi. Lurah desa merupakan salah satu instansi yang membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin masyarakat dan salah satunya membantu menyadarkan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Seorang pemimpin harus mengenal sifat dan kondisi yang dipimpin. Pemimpin harus mampu menciptakan kemudahan untuk merangsang kesadaran yang dipimpin, dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain kepemimpinan, kualitas pelayanan yang baik dan motivasi juga harus diberikan kepada masyarakat. Motivasi adalah dorongan supaya orang dapat melakukan sesuatu dengan ikhlas dan sebaik-baiknya.



2. Faktor ekonomi atau pendapatan masyarakat.

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kerenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum.

Pemerintah daerah telah melakukan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, diantaranya:

1) Mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat;

Kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam masyarakat melalui sosialisasi. Dengan banyaknya informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah pemikiran dan sikap masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak. Pemerintah mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, dengan dibantu oleh aparatur yang ada di setiap kecamatan.

2) Melakukan pendataan ulang agar subjek pajak sesuai dengan keadaan di lapangan;

Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat supaya data subjek pajak sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Upaya ini di lakukan agar tidak terjadinya kecurangan masyarakat dan memastikan ada tidaknya perubahan objek pajak.

- 3) Memberikan penghargaan kepada pekon atau desa yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan berbagai upaya supaya masyarakat sadar akan kewajiban membayar pajak. Salah satu nya dengan memberikan penghargaan kepada pekon atau desa yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu. Dalam hal ini penghargaan bukan diberikan terhadap pekon atau desa melainkan aparatur kecamatan dan aparatur pekon atau desa tersebut. Penghargaan yang diberikan adalah memberikan kesempatan terhadap Camat dan Peratin untuk melakukan ibadah umroh. Salah satu penghargaan ini diberikan kepada pekon atau desa memiliki target Pajak Bumi dan Bangunan yang terbesar dan dapat membayar dengan tepat waktu. Kecamatan dan pekon yang telah menerima penghargaan tersebut adalah kecamatan Balik Bukit dengan pekon Way Mengaku, kecamatan Batu Brak dengan pekon Kota Besi, Kecamatan Air Hitam dengan pekon Sumber Alam.

- 4) Memberikan insentif kepada petugas pemungut pajak.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan upaya dengan memberikan insentif kepada petugas pemungut pajak. Hal ini dilakukan supaya petugas pemungut pajak lebih bersemangat lagi

dalam melaksanakan tugasnya. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada petugas pemungut pajak adalah sebesar 1% dari target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Upaya-upaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat seperti yang telah disebutkan diatas sudah terlaksana dengan baik. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menyadarkan masyarakat wajib pajak.

Namun perlu adanya upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat seperti yang terdapat pada Kabupaten Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat :

- 1) Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan;

Melalui pendidikan ini diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

- 2) Melakukan program sensus perpajakan;

Hal ini dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali. Dengan program ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat

membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi wajib pajak dan membayar pajak.

### **C. Pandangan Ekonomi Islam terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak**

Dalam hal yang berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak ditinjau dari pandangan ekonomi islam. Dari sinilah peneliti melihat bahwa dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak ini memiliki nuansa keagamaan seperti yang terdapat di dalam aspek muamalah sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial, budaya dan sosial ekonomi.

Pemerintah daerah telah melakukan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, diantaranya:

1. Mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat;

Secara umum sosialisasi dapat diartikan sebagai proses dimana manusia mempelajari peraturan maupun norma-norma yang berlaku pada masyarakat tempat tinggal sehingga nantinya dapat melakukan penannya sebagai anggota masyarakat tersebut. Sosialisasi erat kaitannya dengan dengan pengenalan adat istiadat serta budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Menurut Abi Kayis Al-Mahdawy dalam blognya bagi seorang muslim pengertian sosialisasi dalam islam disarankan agar proses sosialisasi dalam masyarakat mengacu pada aturan-aturan agama



islam yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an dan hadits. Salah satu surat dalam Al-Qur'an yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang masyarakat ideal.

2. Melakukan pendataan ulang agar subjek pajak sesuai dengan keadaan di lapangan;

Pendataan ulang dilakukan dengan tujuan agar subjek pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Upaya tersebut dilakukan supaya tidak terjadi adanya kesalahan data yang diterima oleh pemerintah dan tidak adanya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai subjek pajak. Hal ini baik dilakukan agar masyarakat bersikap jujur kepada pemerintah sehingga tidak adanya kecurangan masyarakat yang tidak mau membayar pajak.

3. Memberikan penghargaan kepada pekon atau desa yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu;

Memberikan penghargaan memiliki tujuan supaya masyarakat bisa bersemangat dalam membayar pajak. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak menunda-nunda untuk membayar pajak sehingga mendapatkan denda jika membayar lewat dari batas waktu yang telah ditentukan. Dalam islam dibolehkan untuk mengambil harta atau biasa juga disebut hadiah bila harta tersebut dari penguasa (pemerintah) atau orang lain.



#### 4. Memberikan insentif kepada petugas pemungut pajak.

Insentif diberikan untuk meningkatkan semangat kerja seseorang, karena semangat kerja seseorang itu dipengaruhi oleh motivasi yang mendasari pekerjaan yang dilakukan. Jika motivasi yang dimiliki oleh seseorang itu sesuai dengan keinginannya maka semangat kerja akan meningkat, tetapi jika motivasi yang dimiliki oleh seseorang itu kurang sesuai dengan harapan yang diinginkannya maka semangat kerja seseorang akan menurun. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja yang dimiliki seseorang adalah dengan memberikan insentif. Insentif adalah pemberian sesuatu kepada karyawan atau pekerja berupa uang atau sesuatu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat kerja. Islam menjamin dan melindungi mereka yang mau bekerja keras dan menyuruh para majikan untuk menghargai kerja keras orang yang mau bekerja dengan kepalanya. Seperti dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang artinya :

عَرَفَهُ يَجِفُّ أَنْفَبَلَا جَرَهُ أَعْطُوا الْأَجِيرَ { يعلىٰ أبوروه }

“ Berikanlah gaji kepada para pekerja sebelum kering keringatnya. (HR. Abu Ya'la) ”.

Hadist di atas jelas bahwa seseorang yang bekerja wajib mendapatkan penghargaan atas apa yang telah dikerjakannya, dan seorang majikan wajib memberikan secepatnya setelah pekerjaannya selesai.

Keempat upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak dalam pandangan ekonomi islam sudah baik dan mengacu pada aturan-aturan Al-Qur'an dan hadist.

Selain itu tentu juga harus dipertimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan), dimana menghindari keburukan jauh lebih baik dari pada mencari dan mengambil kebaikan. Sehubungan dengan itu, mencari yang terbaik dari pada yang baik juga harus diutamakan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 18 :

يَعْلَمُونَ لَا الَّذِينَ أَهْوَاءُ تَتَّبِعُوا وَلَا فَاتَّبِعُوا إِلَّا مَرَمِّنَ شَرِيعَةٍ عَلَى جَعَلْنَاكُمْ ثُمَّ

Artinya :Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat(peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.(QS. Al-Jaatsiyah; 18)<sup>75</sup>

Dalam kaitan ini bila Pajak Bumi dan Bangunan membawa pada kemanfaatan dan kebaikan maka pandangan agama adalah positif. Akan tetapi apabila Pajak Bumi dan Bangunan membawa keburukan, maka pandangan agama negatif terhadap kegiatan tersebut. Dalam hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan (mafsadat) lebih baik daripada mencari dan mengambil kebaikan (maslahat).

Oleh karena itu, pandangan agama akan positif jika Pajak Bumi dan Bangunan dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 817

baik. Agama akan berpandang menjadi negatif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan walau tujuannya baik tetapi dilakukan dengan cara yang tidak baik dan jauh dari pandangan syariat, maka hal tersebut ditolak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian, maka pada bab penutup tersebut penulis akan memberikan kesimpulan dan saran agar selajutnya upaya pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadi lebih baik lagi dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyadarkan masyarakat akan wajib pajak. Adapun kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ditunjukkan pada persentase kontribusi PBB rata-rata 3,5% selama 4 tahun terakhir.
2. Upaya pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak yaitu mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat, melakukan pendataan ulang agar subjek pajak sesuai dengan keadaan di lapangan, memberikan penghargaan kepada pekon atau desa yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu, memberikan insentif kepada petugas pemungut pajak.

3. Dalam kaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak dilihat dari pandangan ekonomi Islam yaitu,

- a) Mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat;

Sosialisasi erat kaitannya dengan dengan pengenalan adat istiadat serta budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Bagi seorang muslim pengertian sosialisasi dalam islam disarankan agar proses sosialisasi dalam masyarakat mengacu pada aturan-aturan agama islam yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an dan hadits.

- b) Melakukan pendataan ulang agar subjek pajak sesuai dengan keadaan di lapangan;

Pendataan ulang dilakukan dengan tujuan agar subjek pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Hal ini baik dilakukan agar masyarakat bersikap jujur kepada pemerintah sehingga tidak adanya kecurangan masyarakat yang tidak mau membayar pajak.

- c) Memberikan penghargaan kepada pekon atau desa yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu;

Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak menunda-nunda untuk membayar pajak sehingga mendapatkan denda jika membayar lewat dari batas waktu yang telah



ditentukan. Dalam islam dibolehkan untuk mengambil harta atau biasa juga disebut hadiah bila harta tersebut dari penguasa (pemerintah) atau orang lain.

d) Memberikan insentif kepada petugas pemungut pajak.

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja yang dimiliki seseorang adalah dengan memberikan insentif. Insentif adalah pemberian sesuatu kepada karyawan atau pekerja berupa uang atau sesuatu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat kerja. Islam menjamin dan melindungi mereka yang mau bekerja keras dan menyuruh para majikan untuk menghargai kerja keras orang yang mau bekerja dengan kepalanya.

### **Saran**

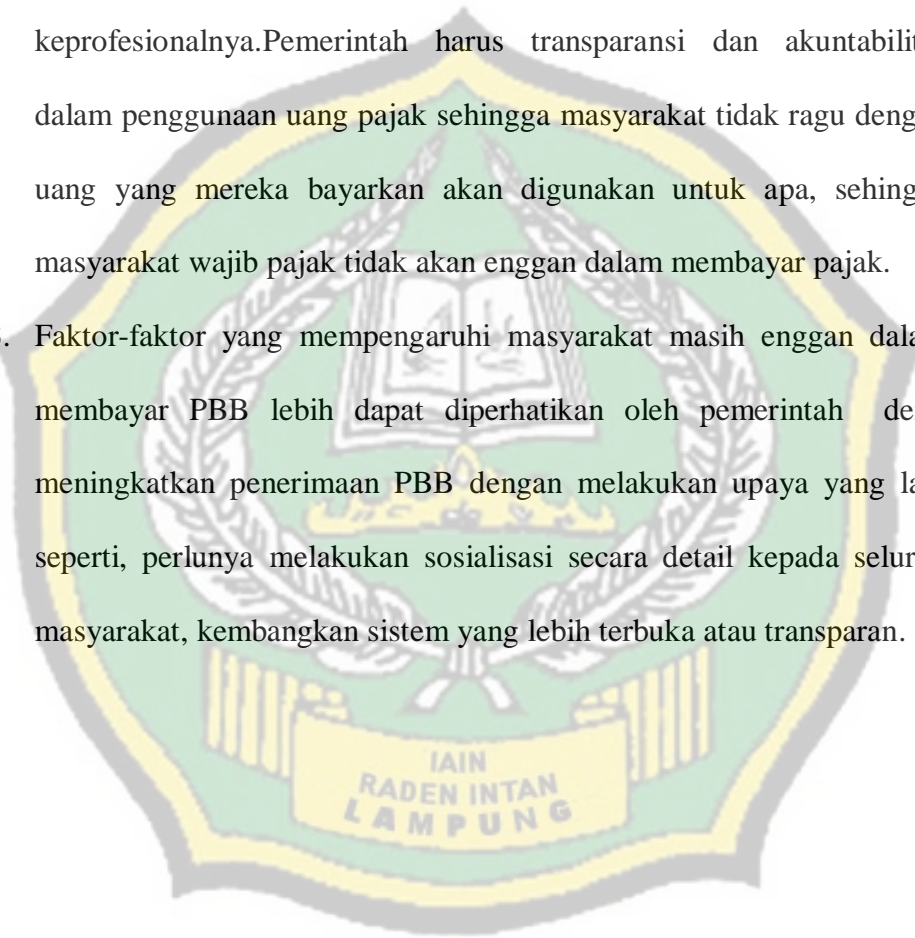
Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini penulis dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai pentingnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan yang memberikan manfaat terhadap pendapatan Asli daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Untuk pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dalam upaya pemerintah menyadarkan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga

memperhatikan Pendapatan Asli daerah dari sektor yang lain. Kabupaten Lampung Barat masih sangat membutuhkan pembangunan disegala bidang, dan dapat memanfaatkan potensi daerah untuk memenuhi target penerimaan daerah dan PAD.

Bagi pengelola Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat mengelola Pajak Bumi dan Bangunan lebih baik dan ditingkatkan keprofesionalnya. Pemerintah harus transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan uang pajak sehingga masyarakat tidak ragu dengan uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk apa, sehingga masyarakat wajib pajak tidak akan enggan dalam membayar pajak.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masih enggan dalam membayar PBB lebih dapat diperhatikan oleh pemerintah demi meningkatkan penerimaan PBB dengan melakukan upaya yang lain seperti, perlunya melakukan sosialisasi secara detail kepada seluruh masyarakat, kembangkan sistem yang lebih terbuka atau transparan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhar, *Skripsi Aplikasi Kharaj dan PBB sebagai Sumber Pendapatan Negara*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. 2011.
- Agustina, Duwi. *Perpajakan*. LPPM STIE Lampung. Bandar Lampung. 2012.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Gramata Publishing. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. RinekaCipta. 1993.
- Asikin, Agustini. *Pajak, Citra dan Bebannya*. Bina Rena Pariwisata.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, 1989.
- Eko, Nugroho. *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2002.
- Fokusmedia. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Fokusmedia. Bandung. 2009.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Raja GrafindoPersada. Jakarta. 2007.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*. Raja GrafindoPersada. Jakarta. 2011.
- Ismawan. Indra. *Memahami Reformasi Perpajakan*. Elex media komputindo. Jakarta. 2000.
- K. Judisseno, Rimsky. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Gramedia. Jakarta. 1999.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islam*. Raja GrafindoPersada. Jakarta. 2012.
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta. 2003.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Dhana. Yogyakarta. Bhakti Wakaf. 1997.
- Mardiasmo. *Perpajakan Revisi Edisi*. ANDI. 2011.

Mujieb, Abdul. dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. PT. Pustaka Firdaus. Jakarta. 1994.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat; Studi Komparatif mengenai Status & Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*. Litera Antar Nusa. Jakarta. 2007.

Rimsky K. Judisseno. *Pajak dan strategi bisnis*. Gramedia. Jakarta. 1999.

Situmorang, Victor M., *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta. 1994.

Sudjana, Nana. *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Rineka Cipta. Jakarta. 1996.

Supriatna. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 1993.

Soemitro, Rahmad. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan*. Ersaco, Jakarta. 1984.

Soeratno, Lincoln Arsyad. *Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi dan Bisnis (Revisi Edisi)*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN. 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Alfabeta. Bandung. 2011.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1998.

Sutedi, Adrian. *Hukum pajak*. Sinar Grafika. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah. Fokus media. Jakarta. 2009.

Utomo, Dwiwarso. *Perpajakan Aplikasi dan terapannya*. Andi. 2011.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia (Edisi 10)*. Salemba Empat. 2011.

Yani, Ahmad. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta RajawaliPers.

Yuliati, *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kelima*. SalembaEmpat. Jakarta. 2000.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. BumiAksara. Jakarta. 2007.

[http//Jurnal Magister Manajemen](http://Jurnal Magister Manajemen)

[http// www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com)

[http//](http://) Ghazali Syamni, *Analisis Kontribusi dan Efektifitas Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*. Aceh. 2012.

